

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TERHADAP PENYIMPANAN BARANG
SITAAN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

Muhammad Hafid

NPM: 22310001

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN**

Diajukan oleh:

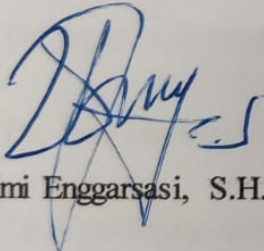
Muhammad Hafid
NPM: 22310001

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 11 Juli 2024

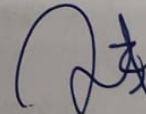
Oleh

Pembimbing I



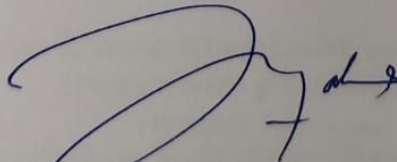
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

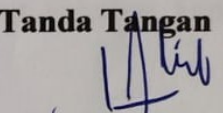
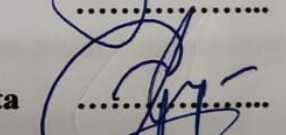

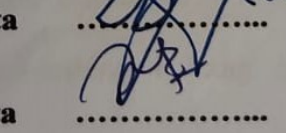
TESIS
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TERHADAP PENYIMPANAN BARANG
SITAAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Hafid
NPM: 22310001

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 24 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	Ketua 
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.	Anggota 
Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. .	Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal
Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafid
NPM : 22310001
Alamat : Desa Oro-Oro Ombo Kulon, Dusun Kedung Lembu.
Rt.01. Rw.11 Kecamatan Rembang. Kab. Pasuruan
No. WA : 08988214820

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyimpanan Barang Sitaan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplaiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Agustus 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Hafid

NPM: 22310001

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada kedua orang tua penulis, penulis yang memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 24 Juli 2024
Yang menyatakan,

Muhammad Hafid
NPM: 22310001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Teoritis.....	8
1.5.1 Kajian Teoritis tentang Kepastian Hukum... ..	8
1.5.2 Kajian Teoritis tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	11
1.5.3 Kajian Teoritis tentang Penyitaan	13
1.5.4 Kajian Teoritis tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	29
1.7 Sistematika Pertanggungjawaban.....	33
BAB II KEWENANGAN SATPOL PP TERHADAP PENYITAAN BARANG USAHA PKL YANG MELANGGAR HUKUM	35
2.1 Kewenangan Satpol PP dalam prosedur penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	35
2.2 Aspek Yuridis Keabsahan Kewenangan Penyitaan Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Yang Berlaku	42
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN HUKUMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYIMPANAN BARANG SITAAN YANG BERASAL DARI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA	50
3.1 Konsep yuridis dan batasan benda/barang sitaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	50
3.2 Pertanggungjawaban Hukum Satpol PP Terhadap Penyimpanan Barang Sitaan Yang Berasal Dari Penertiban PKL	57

BAB IV PENUTUP	
63 4.1 Kesimpulan.....	
63 4.2 Saran.....	
65	
DAFTAR BACAAN.....	67

ABSTRAK

Polemik mengenai tata kota terhadap pedagang kaki lima telah menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kota maupun Kota, tidak terkecuali di Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto yang menginginkan kotanya terlihat lebih indah dan rapi, terkendala dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada daerah pedestrian dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa penyitaan barang milik PKL, padahal penyitaan hanya dapat dilakukan ketika pelaku telah berbuat sebuah kejahatan bukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satpol PP dapat menyita barang milik PKL dan bagaimana prosedur Satpol PP dalam menertibkan PKL. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 beserta peraturan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil penelitian wewenang Satpol PP dalam menyita barang PKL di Kota Mojokerto ada 2 (dua), yakni Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan barang milik PKL, dikarenakan berjualan bukan merupakan perbuatan pidana dan Penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui proses yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto. Perlu adanya kajian lebih lanjut dari Pemerintah mengenai definisi penyitaan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto, sehingga tidak terjadi kekaburan aturan mengenai penyitaan yang dimaksud oleh Satpol PP.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pedagang Kaki Lima (PKL), Pertanggungjawaban Hukum, Penyitaan

ABSTRACT

The polemic regarding urban planning towards street vendors has become a problem that occurs in every city and town, including Mojokerto. The Mojokerto City Government, which wants its city to look more beautiful and neat, is hampered by the presence of street vendors selling in pedestrian areas and green spaces. Satpol PP is a representative of the government whose task is to enforce regional regulations and maintain public order and public peace. They are regional officials whose job is to control street vendors in the field. Satpol PP officers often struggle with traders because the traders feel disadvantaged by the treatment of Satpol PP. This treatment can take the form of confiscating goods belonging to street vendors, even though confiscation can only be carried out when the perpetrator has committed a crime, not a violation. This research aims to find out whether Satpol PP can confiscate goods belonging to street vendors and what the Satpol PP procedures are in controlling street vendors. This legal research is normative legal research. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The types of data used are primary and secondary data. Data obtained from Government Regulation Number 6 of 2010 and related regulations. The analysis used in this research is qualitative. The results of research on the authority of Satpol PP in confiscating street vendors' goods in Mojokerto City are two (2), namely that Satpol PP does not have the authority to confiscate goods belonging to street vendors, because selling is not a criminal act and confiscations carried out by Satpol PP cannot be carried out directly, but must go through the process written in the Mojokerto City Regional Regulations. There needs to be further study from the Government regarding the definition of confiscation used in the Mojokerto City Regional Regulations, so that there is no ambiguity in the rules regarding confiscation intended by the Satpol PP.

Keywords : Civil Service Police Unit (Satpol PP), Street Vendors (PKL), Legal Accountability, Confiscation

